

BAB II

GAMBARAN UMUM KOMINFO

2.1 Profil Kemenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan salah satu perangkat dalam pemerintahan Republik Indonesia, sebagaimana yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Kominfo, 2017). Adapun tugas pokok dari Kemenkominfo yaitu merancang kebijakan, membangun infrastruktur yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika, dan sebagai wadah informasi publik. Kedudukan dari Kemenkominfo berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana yang tertera di Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

2.1.1 Sejarah Kemenkominfo

Sejarah awal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bermula setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih bernama Departemen Penerangan, dan memiliki tugas untuk mengatur beberapa media penerangan, antara lain: radio, film, percetakan, stensil, mesin ketik, dan foto atau dokumentasi (Kominfo, 2017).

Kemudian pada tahun 1966, Departemen Penerangan memiliki tugas pokok untuk mengontrol pendapat umum dengan kata lain Departemen Penerangan berfungsi sebagai juru bicara pemerintah (Kominfo, 2017).

Pada tahun 1971, Departemen Penerangan mengembangkan sistem komunikasi terintegrasi dengan membentuk lembaga Badan Koordinasi

Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS), Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN), dan Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS). Tujuan utamanya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam media massa. Selain itu, untuk mendukung sarana penerangan di daerah antara lain: radio, televisi, film, pers penerbitan, pameran, dan pertunjukkan rakyat (Kominfo, 2017).

Pada masa reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terjadinya reposisi terhadap perangkat daerah yang membuat kelembagaan penerangan terkoordinasi oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, pada tahun 1999 dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) untuk tingkat pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 (Kominfo, 2017).

Kemudian pada tahun 2000, dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LNI), lalu statusnya berubah kembali menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneq Kominfo). Adapun tugas pokok dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi sebagai layanan informasi publik, sedangkan BIKN hanya bertanggung jawab kepada Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo, 2017).

Pada tahun 2005, terjadi integrasi antara Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dengan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Hasil dari integrasi tersebut menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Tugas pokok dari Departemen Komunikasi dan Informatika yaitu menyebarkan informasi nasional, membuka akses informasi, serta membangun infrastruktur telekomunikasi. (Kominfo, 2017).

Pada tahun 2010, Departemen Komunikasi dan Informatika resmi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta lebih dikenal hingga saat ini.

Gambar 2.1 Sejarah Kemenkominfo



Sumber: Website Kominfo

2.1.2 Visi dan Misi Kemenkominfo

Visi dan misi dari Kemenkominfo merupakan acuan berdasarkan visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin yang diselaraskan sebagai berikut:

2.1.2.1 Visi

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Kominfo, 2017).

2.1.2.2 Misi

Terdapat sembilan misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
2. Menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, produktif, dan dapat berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara Republik Indonesia.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi dengan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kominfo, 2017).

2.1.3 Logo Kemenkominfo

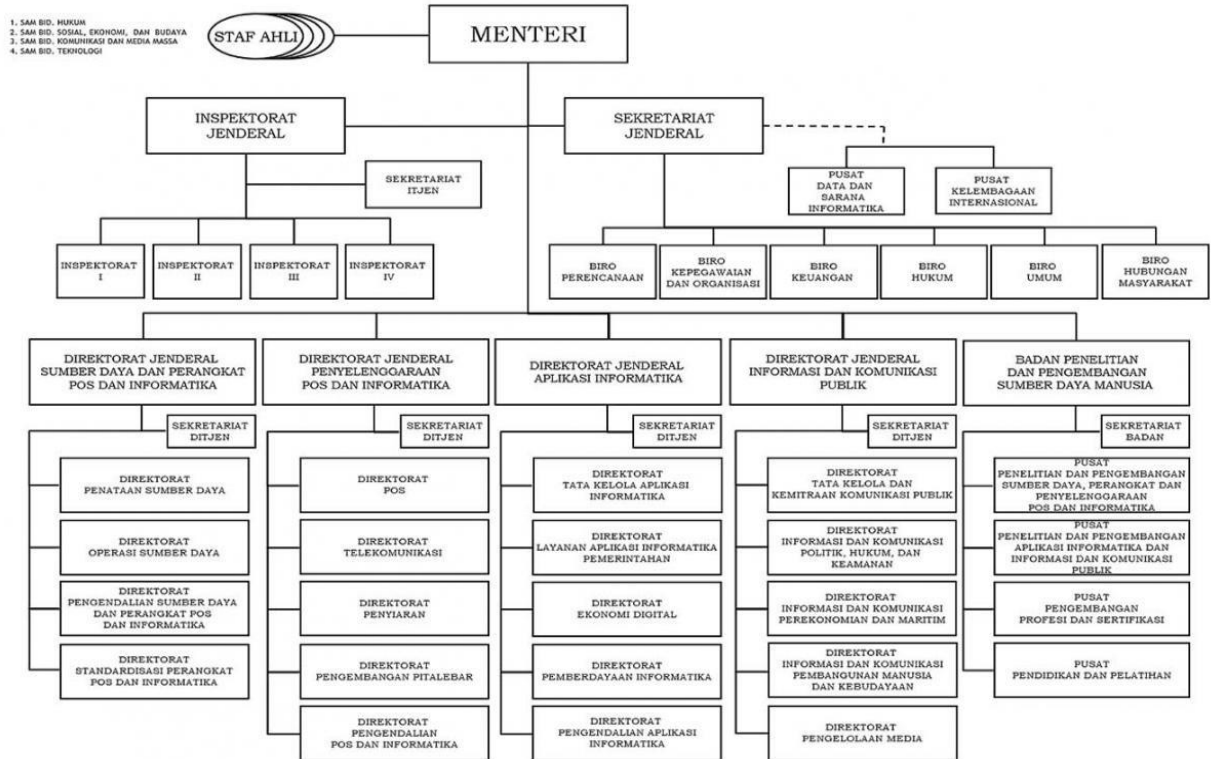
Gambar 2.2 Logo Kemenkominfo



Sumber: Website PPID Kemkominfo

2.1.4 Struktur Organisasi Kemenkominfo

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kemenkominfo



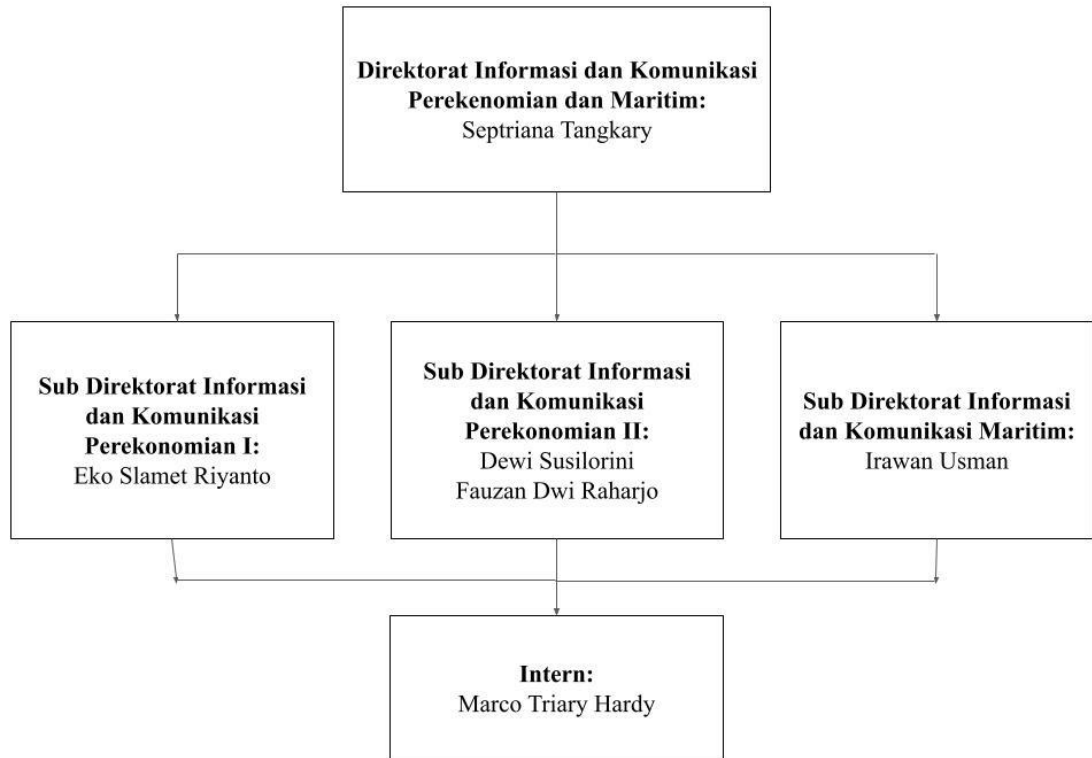
Sumber: Website Kominfo

2.2 Ruang Lingkup Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim yang dipimpin oleh Septriana Tangkary memiliki tugas pokok sebagai pembimbing teknis atau supervisi, memberikan laporan, pengawasan atau pemantauan, dan membantu dalam hal komunikasi dan informasi di bidang perekonomian dan

maritim. Adapun bidang perekonomian dan maritim meliputi beberapa sektor. Untuk bidang maritim meliputi: sektor kelautan, sektor perhubungan, sektor pariwisata, serta sektor energi dan sumber daya mineral. Sedangkan untuk bidang perekonomian dibagi menjadi dua bagian, yaitu perekonomian I dan perekonomian II. Untuk bidang perekonomian I meliputi: sektor keuangan, sektor lingkungan hidup, sektor pertanian, serta sektor pertanahan atau agraria. Untuk bidang perekonomian II meliputi: sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, badan usaha milik negara, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim



Sumber: Website DJIKP Kominfo yang diolah oleh Penulis

Adapun setiap bidang di Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim memiliki beberapa Sub Direktorat seperti yang tertera di atas. Untuk Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian I dipimpin oleh Eko Slamet Riyanto. Kemudian untuk Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian II dibawah oleh Dewi Susilorini dan Fauzan Dwi Raharjo. Terakhir untuk Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi Maritim dipimpin oleh Irawan Usman. Masing-masing Sub Direktorat memiliki tugas mengawasi dan memantau perihal komunikasi dan informasi di bidang perekonomian dan maritim.

Dalam memberikan informasi bidang perekonomian dan maritim kepada masyarakat, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim memanfaatkan internet dan media sosial. Untuk internet melalui *website* sakuin.id, sedangkan untuk media sosial menggunakan Instagram dan Twitter dengan *username* @sakuinformasi dengan memproduksi konten-konten menarik.

Proses kerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dalam memberikan informasi bidang perekonomian dan maritim melalui media sosial melalui beberapa tahapan:

1. Tahap awal, menugaskan setiap Sub Direktorat untuk memantau isu-isu yang diangkat oleh kementerian-kementerian terkait di bidang perekonomian dan maritim.
2. Tahap kedua, tim media sosial dari Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim akan menentukan jenis konten setiap harinya di antara konten foto, infografis, dan komik sesuai dengan jadwalnya.
3. Tahap ketiga, masing-masing Sub Direktorat menentukan isu yang layak untuk diinformasikan kepada masyarakat dari beberapa sektor kementerian, yang berhubungan dengan bidang Sub Direktorat masing-masing.

4. Tahap keempat, masing-masing Sub Direktorat menugaskan tim penulis dan *copywriting* konten media sosial yang bertugas untuk membuat tulisan menarik dari isu yang akan di angkat, kemudian diberikan kepada tim desain visual untuk membuat tampilan gambar menarik menjadi sebuah konten media sosial.
5. Tahap terakhir, melakukan proses pengecekan terhadap konten media sosial yang sudah siap, sebelum konten tersebut dipublikasikan.

Di Direktorat Informasi dan Komunikasi Perkenomian dan Maritim, penulis dipercaya untuk menjadi tim penulis naskah konten media sosial di semua Sub Direktorat. Penulis mendapat kesempatan untuk menuliskan kembali atau penulisan ulang berbagai informasi dari kementerian-kementerian terkait, yang dikemas dalam bentuk konten foto, infografis, dan komik. Setiap minggunya, penulis mendapatkan arahan melakukan penulisan ulang terhadap informasi dari kementerian-kementerian terkait untuk konten media sosial di Sub Direktorat yang berbeda.